



**RENCANA KERJA (RENJA)  
TAHUN 2017**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL,  
MENENGAH**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Tahun 2017 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017 ini memuat rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung yang rencananya akan dilaksanakan tahun 2017 penentuan target dan sasaran yang akan di capai pada tahun 2017 yang didasarkan pada sasaran dan indikator yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Periode 2015 – 2019. Penyusunan RENJA Tahun 2017 Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung ini di susun sebagai pedoman, arah dan tujuan penyelenggaraan pembangunan di bidang Koperasi dan UMKM. Kami menyadari dokumen ini masih belum sempurna, masukan dan koreksi sangat diharapkan guna perbaikan-perbaikan diwaktu yang akan datang.

Demikian RENJA Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung tahun 2017 ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, Maret 2016

**KEPALA DINAS,**

**Ir. PRIHATONO G.ZAIN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630411 198802 1 002

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU .....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2015 .....	5
2.2 Evaluasi Capaian RENJA Tahun 2015 Terhadap RENSTRA.....	21
2.3 Analisis Pelayanan SKPD.....	23
2.4 Isu-Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	28
III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 .....	30
3.1 Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi .....	30
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD .....	32
3.3 Program dan Kegiatan.....	34
3.4 Isu-Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	28
IV. PENUTUP .....	39
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program RENJA Tahun 2015.....	5
Tabel 2.2. Capaian Kinerja dan Anggaran Program RENJA Tahun 2015.....	6
Tabel 2.3. Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program RENSTRA .....	22
Tabel 2.4. Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis Tahun 2015 .....	23
Tabel 2.5. Perkembangan jumlah tenaga kerja, anggota koperasi, jumlah omset dan aset koperasi serta pelayanan izin simpan pinjam tahun 2014 – 2015.....	25
Tabel 3.1. Indikator Kinerja dan Target Sasaran Tahun 2017 .....	33

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang merupakan program pembangunan 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan program pembangunan 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman pembangunan tahunan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Provinsi Lampung ini merupakan dokumen komprehensif berwawasan 1 (satu) tahun. Penyusunan RENJA ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015-2019 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Provinsi Lampung serta perwujudan program dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Provinsi Lampung untuk lima tahun ke depan.

Penyusunan RENJA ini memuat program, kegiatan, tujuan, sasaran dan target yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di tahun 2017 yang diselaraskan dengan tema pembangunan nasional 2017 dan prioritas pembangunan nasional 2017 serta tema pembangunan dan Provinsi Lampung 2017 dan prioritas pembangunan Provinsi Lampung 2017 dimana Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung masuk pada prioritas Provinsi Lampung 2017 ke 5 yaitu Mengembangkan industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif serta meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM.

## 1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Tahun 2017 disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025.
6. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
7. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
8. Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah No. 07 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
10. Peraturan Pemerintah No.08 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239 Tahun 2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025.
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan 2029.
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung.
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017 ini adalah sebagai berikut :

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan RENJA Tahun 2017 ini disusun dengan maksud untuk memberikan arah perencanaan, kebijakan dan program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Provinsi Lampung tahun 2017.

#### **1.3.2 Maksud**

Tujuan Penyusunan RENJA Tahun 2017 ini adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan di tahun 2017 yang sejalan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2015-2019 Pemerintah Provinsi Lampung.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan RENJA Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

### **1.4.1 BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan RENJA Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung.

### **1.4.2 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2015**

Bab ini memuat informasi tentang Evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Tahun 2015 dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

### **1.4.3 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRA DAN KEGIATAN**

Bab ini memuat analisis kebijakan nasional dan provinsi, sasaran dan tujuan serta rencana program dan kegiatan tahun 2017.

### **1.4.4 BAB IV PENUTUP**

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan Renja Dinas Koperasi dan UMKM, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan serta catatan dan harapan kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung.



## II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2015

Dibawah ini adalah tabel persentase rata-rata capaian kinerja per program tahun 2015. Persentase rata-rata capaian kinerja ini dihitung dengan membandingkan target kinerja fisik dan keuangan kegiatan tahun 2015 dengan realisasi kinerja fisik dan keuangan kegiatan di tahun 2015 dikali 100 persen. Berikut adalah tabel rata-rata pencapaian kinerja program di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.

Tabel 2.1. Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program RENJA Tahun 2015

NO	PROGRAM	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		PREDIKAT KERJA	
		FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN
1	Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100,00	95,95	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00	89,63	Sangat Tinggi	Tinggi
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	100,00	98,24	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00	98,85	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
5	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	95,01	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
6	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	100,00	95,83	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
7	Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Modal KUMKM	100,00	84,99	Sangat Tinggi	Tinggi
8	Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	100,00	96,15	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	<b>RATA-RATA JUMLAH</b>	<b>100,00</b>	<b>93,54</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Dari 8 Program yang ada di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, capaian rata-rata realisasi anggaran terendah ada pada Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Modal KUMKM sebesar 84,99 persen dari total anggaran program ini yaitu sebesar Rp. 1.086.205.713,-. Sedangkan realisasi keuangan tertinggi terdapat pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang mencapai 98,85 persen. Adapun realisasi capaian kinerja kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2. Capaian Kinerja dan Anggaran Program RENJA Tahun 2015

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang Dievaluasi (2015)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang Dievaluasi (2015)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2015 (%)		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4		5		
<b>DINAS KOPERASI DAN UMKM</b>			<b>6.325.205.713</b>		<b>5.916.301.234</b>	<b>100,00</b>	<b>93,54</b>	
<b>Pelayanan Adminstrasi Perkantoran</b>	<b>Terwujudnya pelayanan perkantoran yang memenuhi tertib adminstrasi selama 12 bulan</b>	<b>60</b>	<b>921.808.600</b>	<b>12</b>	<b>884.447.558</b>	<b>100,00</b>	<b>95,95</b>	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah pembiayaan penyediaan jasa surat menyurat (bln)	12	12.000.000	12	11.877.000	100,00	98,98
2	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	jumlah pembiayaan rekening telpon, air dan listrik (bln)	12	180.000.000	12	166.007.858	100,00	92,23
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah pembiayaan penyediaan pelayanan administrasi keuangan (bln)	12	216.400.000	12	214.000.000	100,00	98,89
4	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	jumlah pembiayaan Jasa Kebersihan kantor (bln)	12	28.443.600	12	28.442.800	100,00	100,00
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah pembiayaan alat tulis kantor (bln)	12	50.000.000	12	49.998.800	100,00	100,00
6	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	jumlah pembiayaan barang cetakan dan penggandaan (bln)	12	22.000.000	12	22.000.000	100,00	100,00
7	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan	jumlah pembiayaan Komponen Instalasi listrik/penerangan	12	12.054.000	12	12.053.500	100,00	100,00

	kantor	bangunan (bln)						
8	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (bln)	3	15.000.000	3	13.528.000	100,00	90,19
9	Penyediaan Makanan dan minuman	jumlah penyediaan makan dan minum rapat (bln)	12	35.000.000	12	30.121.000	100,00	86,06
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah rapat koordinasi ke luar daerah (kali)	10	148.907.000	10	148.582.800	100,00	99,78
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	jumlah rapat koordinasi dalam daerah (kali)	17	129.004.000	17	128.835.800	100,00	99,87
12	Pameran dan Promosi Pembangunan	jumlah pameran dan promosi pembangunan yang di ikuti (even)	1	73.000.000	1	59.000.000	100,00	80,82
	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur selama 12 bulan (Paket)</b>	<b>1</b>	<b>776.428.400</b>	<b>1</b>	<b>695.901.575</b>	<b>100,00</b>	<b>89,63</b>
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor (paket)	1	597.000.000	1	557.589.000	100,00	93,40
2	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	jumlah pemeliharaan rutin Kendaraan dinas/ operasional (bln)	12	119.428.400	12	78.452.575	100,00	65,69
3	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor (bln)	12	60.000.000	12	59.860.000	100,00	99,77
	<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Jumlah paket kegiatan penunjang peningkatan disiplin aparatur (pkt)</b>	<b>1</b>	<b>139.150.000</b>	<b>1</b>	<b>136.706.000</b>	<b>100,00</b>	<b>98,24</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	jumlah pakaian Dinas (jenis)	3	139.150.000	3	136.706.000	100,00	98,24
	<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Terwujudnya pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur selama 12 bulan</b>	<b>12</b>	<b>409.572.000</b>	<b>12</b>	<b>404.844.901</b>	<b>100,00</b>	<b>98,85</b>
1	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pembiayaan	12	52.643.000	12	51.742.800	100,00	98,29

	Formal	pendidikan dan pelatihan formal (bln)						
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Program	Jumlah koordinasi program/kegiatan antar daerah dan antara pusat dengan daerah (kali)	3	50.000.000	3	49.285.200	100,00	98,57
3	Pengelolaan SDM Umum, Kepegawaian dan Diklat Pegawai	jumlah kegiatan pengelolaan SDM Umum, Kepegawaian dan Diklat Pegawai (jenis)	4	50.000.000	4	49.950.000	100,00	99,90
4	Musrenbang Tahun 2015	Jumlah rapat musrenbang (kali)	1	67.929.000	1	66.584.000	100,00	98,02
5	Rapat tehnik anggota MPU Sektor Koperasi	jumlah rapat koordinasi program kerja anggota MPU sektor koperasi dan UMKM tahun 2015 (kali)	1	89.000.000	1	88.760.000	100,00	99,73
6	Kerjasama Anggota MPU Sektor Koperasi dan UMKM, Sektor Perdagangan dan Sektor Industri	jumlah rapat kerjasama anggota MPU sektor koperasi dan UMKM, Sektor Perdagangan dan Sektor Industri (kali)	3	50.000.000	3	48.790.901	100,00	97,58
7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sektor Koperasi dan UMKM, sektor perdagangan dan sektor industri	jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan (kali)	1	50.000.000	1	49.732.000	100,00	99,46
<b>Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Terwujudnya pelaksanaan peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan (bln), jumlah dokumen perencanaan (dok)</b>	<b>12</b>	<b>311.974.000</b>	<b>12</b>	<b>296.392.300</b>	<b>100,00</b>	<b>95,01</b>
1	Penyusunan Laporan Keuangan	jumlah laporan keuangan (dok)	2	30.957.000	2	30.957.000	100,00	100,00
2	Penyusunan Laporan Bulanan	jumlah penyusunan laporan bulanan (bln)	12	10.715.000	12	10.602.800	100,00	98,95
3	Penyusunan data Kepegawaian	jumlah jenis data kepegawaian yang disusun (jenis)	4	60.000.000	4	59.160.500	100,00	98,60
4	Peningkatan Akuntabilitas Laporan	Jumlah pembiayaan akuntabilitas	12	76.000.000	12	66.000.000	100,00	86,84

	Keuangan	pelaporan						
5	Penyusunan Laporan capaian kinerja	jumlah dokumen laporan kinerja (dok)	10	64.285.000	10	59.708.000	100,00	92,88
6	Peningkatan Data dan Informasi	jumlah pembiayaan jasa sistem informasi data sektor koperasi dan UMKM (bln)	12	70.017.000	12	69.964.000	100,00	99,92
<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan UMKM</b>		<b>Jumlah KUMKM yang terfasilitasi peningkatan sistem pendukung usahanya</b>	<b>375.000</b>	<b>605.000.000</b>	<b>381.822</b>	<b>579.754.700</b>	<b>100,00</b>	<b>95,83</b>
1	Rakor Pemberdayaan KUMKM dibidang pembiayaan	jumlah rakor dengan dinas/steakholder terkait (kali)	2	100.000.000	2	95.198.000	100,00	95,20
2	Peningkatan dan Perluasan Akses Permodalan bagi KUMKM	Jumlah rapat peningkatan dan Perluasan Akses Permodalan bagi KUMKM (kali)	1	105.000.000	1	104.976.000	100,00	99,98
3	Rakor Fasilitasi dan Sosialisasi Perusahaan Penjamin Kredit Daerah	jumlah rakor dengan dinas/steakholder terkait (kali)	4	29.200.000	4	29.108.000	100,00	99,68
4	Rakor pemberdayaan kelembagaan dan usaha Koperasi dan UMKM	jumlah rakor pemberdayaan kelembagaan dan usaha Koperasi dan UMKM (kali)	2	120.000.000	2	116.286.700	100,00	96,91
5	Temu konsultasi pemberdayaan usaha KUMKM	jumlah rapat temu konsultasi pemberdayaan usaha KUMKM (kali)	2	90.000.000	2	73.480.000	100,00	81,64
6	Monitoring dan evaluasi koperasi penerima bantuan di 15 kab/kota	jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi (kali)	15	80.000.000	15	79.950.000	100,00	99,94
7	Transplantasi dalam rangka pembentukan PPKD Provinsi Lampung	jumlah transplantasi pembentukan PPKD Provinsi Lampung (kali)	1	80.800.000	1	80.756.000	100,00	99,95
<b>Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Modal KUMKM</b>		<b>Jumlah Perolehan PAD BLUD UPTD Perkuatan Modal KUMKM (kali)</b>	<b>12</b>	<b>1.086.205.713</b>	<b>12</b>	<b>923.163.000</b>	<b>100,00</b>	<b>84,99</b>
1	Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD	jumlah waktu peningkatan Kinerja Layanan PPK-BLUD (bln)	12	600.000.000	12	449.800.000	100,00	74,97
2	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUD	jumlah KUMKM yang termonitoring dan terevaluasi pemanfaatan	160	166.205.713	160	165.981.000	100,00	99,86

		dana bergulir BLUD (kumkm)						
3	Diklat Perkuatan Modal Usaha bagi UMKM Calon/Penerima Dana Bergulir BLUD	jumlah peserta diklat perkuatan modal usaha bagi UMKM Calon/Penerima Dana Bergulir BLUD (orang)	90	130.000.000	90	129.340.000	100,00	99,49
4	Bimtek penyusunan laporan keuangan bagi KUMKM penerima Dana Bergulir BLUD	jumlah peserta bimtek penyusunan laporan keuangan bagi KUMKM penerima Dana Bergulir BLUD (orang)	60	120.000.000	60	112.992.000	100,00	94,16
5	Sosialisasi penyaluran pinjaman BLUD KUMKM	jumlah peserta sosialisasi penyaluran pinjaman BLUD KUMKM (orang)	180	70.000.000	180	65.050.000	100,00	92,93
	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</b>	<b>Jumlah Koperasi dan UMKM yang mendapat pelatihan peningkatan kualitas kelembagaan (orang)</b>	<b>2760</b>	<b>2.075.067.000</b>	<b>2760</b>	<b>1.995.091.200</b>	<b>100,00</b>	<b>19,46</b>
1	Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi	jumlah even hari koperasi (even)	1	275.000.000	1	254.643.100	100,00	92,60
2	Koordinasi kelembagaan dan Up-dating data keragaan koperasi	jumlah koordinasi kelembagaan dan Up-dating data keragaan koperasi (kali)	15	100.000.000	15	99.403.000	100,00	99,40
3	Workshop revitalisasi koperasi	Jumlah peserta workshop revitalisasi kopersi (orang)	100	80.000.000	100	67.980.000	100,00	84,98
4	Peningkat an Pemahaman terhadap aturan perpajakan bagi koperasi	Jumlah peserta bimtek pemahaman aturan perpajakan bagi koperasi (orang)	70	100.000.000	70	100.000.000	100,00	100,00
5	Rakor pembinaan terhadap Koperasi tidak aktif	Jumlah peserta rakor (orang)	100	150.000.000	100	142.745.000	100,00	95,16
6	Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Kewirausahaan melalui pembentukan UKM Center	Jumlah SDM pengelola koperasi dan UMKM yang tumbuh jiwa Kewirausahaann ya (orang)	50	245.000.000	50	228.012.000	100,00	93,07
7	Pemeriksaan Koperasi	Jumlah koperasi yang di nilai (koperasi)	60	100.000.000	60	97.202.000	100,00	97,20
8	Diklat Membuat	Jumlah peserta	20	89.867.000	20	88.260.000	100,00	98,21

	Website dan Internet Marketing bagi KUMKM	diklat (orang)						
9	Pelatihan Akuntansi Komputer bagi Koperasi usaha Ritel	jumlah peserta pelatihan (orang)	20	80.000.000	20	78.683.000	100,00	98,35
10	Diklat Ketrampilan menjahit bagi Koppon tren	Jumlah peserta diklat (orang)	32	80.000.000	32	79.995.600	100,00	99,99
11	Bimtek peningkat an kelembagaan bagi koperasi tidak aktif	Jumlah peserta bimtek (orang)	60	150.000.000	60	149.727.000	100,00	99,82
12	Diklat Kewirausahaan Bidang Boga bagi Ibu RT dan Remaja Putus Sekolah	Jumlah peserta diklat (orang)	20	80.000.000	20	74.275.000	100,00	92,84
13	Diklat pembuatan aneka souvenir khas Lampung	Jumlah peserta diklat (orang)	20	49.000.000	20	47.248.000	100,00	96,42
14	Monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM Koperasi dan UMKM	jumlah rapat monitoring dan evaluasi pengembangan SDM koperasi dan UMKM (kali)	1	80.000.000	1	74.907.000	100,00	93,63
15	Bimtek manajemen usaha bagi pengelola Koperasi penerima bansos	jumlah peserta bimtek menejemen usaha bagi pengelola koperasi penerima bansos (orang)	34	70.000.000	34	66.000.000	100,00	94,29
16	Bimtek Kewirausahaan bagi UMKM	Jumlah peserta bimtek (orang)	30	66.200.000	30	66.200.000	100,00	100,00
17	Pengembangan, pengendalian dan pengawasan koperasi simpan pinjam	jumlah kegiatan pengembangan, pengendalian dan pengawasan koperasi simpan pinjam (kali)	2	130.000.000	2	129.999.500	100,00	100,00
18	Pengembangan SDM bagi pembina dan koperasi simpan pinjam	jumlah pengembangan SDM bagi pembina dan koperasi simpan pinjam (kali)	2	150.000.000	2	149.811.000	100,00	99,87
<b>J U M L A H</b>				<b>6.325.205.713</b>		<b>5.916.301.234</b>		<b>93,54</b>

Dari tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tahun 2015 penyerapan anggaran ataupun realisasi kinerja dan anggaran Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung sudah sangat tinggi. Hal ini terlihat dari total rata-rata realisasi kinerja program dan kegiatan pada tahun anggaran 2015

sudah seluruhnya mencapai 100 persen. Hal ini menandakan bahwa semua program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 sudah seluruhnya dilaksanakan dan selesai tepat pada waktunya.

Sedangkan untuk realisasi keuangan tahun anggaran 2015 sebesar 93,54 persen dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 6.325.205.713,-. Hal ini berarti ada sebesar 6,46 persen dari total anggaran Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Tahun 2015 atau sebesar Rp. 408,904,479,- yang tidak terserap. Serapan anggaran terendah yaitu pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional hanya sebesar 65,69 persen. Hal ini dikarenakan kendaraan dinas yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung masih baru, sehingga tidak membutuhkan perawatan yang banyak. Selain itu secara serapan anggaran rendah (74,97%) tetapi sebenarnya secara kinerja sudah baik yaitu pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan PPK BLUD. Jumlah anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 449.800.000,-. Sisa anggaran ini merupakan PAD Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung. Adapun target PAD yaitu sebesar Rp. 450.000.000,-. Artinya secara fisik maupun keuangan sudah tercapai 100%.

Secara rinci masing-masing realisasi kegiatan yaitu:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 12 kegiatan yaitu :
  1. Penyediaan jasa surat menyurat, dengan biaya Rp. 12.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pembiayaan penyediaan jasa surat menyurat dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 11.877.000,- dan telah terlaksana 100%.
  2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan biaya Rp. 180.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pembiayaan rekening telepon, air dan listrik dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 166.007.858,- dan telah terlaksana 100%.
  3. Penyediaan jasa administrasi keuangan, dengan biaya Rp. 216.400.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pembiayaan penyediaan jasa



- administrasi keuangan dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 214.000.000,- dan telah terlaksana 100%.
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor, dengan biaya Rp. 28.443.600,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pembiayaan jasa kebersihan kantor dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 28.442.800,- dan telah terlaksana 100%.
  5. Penyediaan alat tulis kantor, dengan biaya Rp. 50.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pembiayaan alat tulis kantor dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 49.998.800,- dan telah terlaksana 100%.
  6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan biaya Rp. 22.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pembiayaan barang cetakan dan penggandaan dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 22.000.000,- dan telah terlaksana 100%.
  7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor, dengan biaya Rp. 12.054.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pembiayaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 12.053.500,- dan telah terlaksana 100%.
  8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan, dengan biaya Rp. 15.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan target 3 jenis. Terealisasi Rp. 13.528.000,- dan telah terlaksana 100%.
  9. Penyediaan makanan dan minuman, dengan biaya Rp. 35.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 30.121.000,- dan telah terlaksana 100%.
  10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dengan biaya Rp. 148.907.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah koordiansi dan konsultasi ke luar daerah dengan target 10 kali. Terealisasi Rp. 148.582.800,- dan telah terlaksana 100%.
  11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, dengan biaya Rp. 129.004.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah dengan target 17 kali. Terealisasi Rp. 128.895.000,- dan telah terlaksana 100%.

12. Pameran dan promosi pembangunan, dengan biaya Rp. 73.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pameran dan promosi yang diikuti dengan target 1 even. Terealisasi Rp. 59.000.000,- dan telah terlaksana 100% bertempat di Lapangan PKOR Way Halim Permai Kota Bandar Lampung.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 3 kegiatan yaitu:

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor, dengan biaya Rp. 597.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan target 1 paket. Terealisasi Rp. 557.589.000,- dan telah terlaksana 100%.

2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, dengan biaya Rp. 119.428.400,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 78.452.000,- dan telah terlaksana 100%.

3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, dengan biaya Rp. 60.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 59.860.000,- dan telah terlaksana 100%.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan 1 kegiatan yaitu :

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, dengan biaya Rp. 139.150.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pakaian dinas dengan target 3 jenis. Terealisasi Rp. 136.706.000,- dan telah terlaksana 100%.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan 7 kegiatan yaitu :

1. Pendidikan dan pelatihan formal, dengan biaya Rp. 52.643.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pendidikan dan pelatihan formal

- dengan target 12 kali. Terealisasi Rp. 51.742.800,- dan telah terlaksana 100%.
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Program, dengan biaya Rp. 50.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah koordinasi program/kegiatan antar daerah dan antara pusat dengan daerah dengan target 3 kali. Terealisasi Rp. 49.285.200,- dan telah terlaksana 100%.
  3. Pengelolaan SDM Umum, Kepegawaian dan Diklat Pegawai, dengan biaya Rp. 50.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah kegiatan pengelolaan SDM umum, kepegawaian dan diklat pegawai dengan target 4 kali. Terealisasi Rp. 49.950.000,- dan telah terlaksana 100%.
  4. Musrenbang Tahun 2015, dengan biaya Rp. 67.929.000,-. Indikator kegiatan adalah jumlah rapat musrenbang dengan target 1 kali rapat. Terealisasi Rp. 66.584.000,- dan telah terlaksana 100%.
  5. Rapat teknis anggota MPU sektor koperasi, dengan biaya Rp. 89.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah rapat koordinasi program kerja anggota MPU sektor koperasi dengan target 1 kali rapat. Terealisasi Rp. 88.760.000,- dan telah terlaksana 100%. Rapat dilaksanakan di Hotel Novotel pada bulan Mei 2016.
  6. Kerja Sama Anggota MPU sektor koperasi dan UMKM, sektor Perdagangan dan sektor Industri dengan biaya Rp. 50.000.000,-. indikator kinerjanya adalah jumlah rapat kerja sama anggota MPU sektor Koperasi dan UMKM, sektor Perdagangan dan sektor Industri dengan target 3 kali rapat. Terealisasi Rp. 48.790.901.000,- dan telah terlaksana 100%. Merupakan kerjasama antara 10 Provinsi yang merupakan anggota Mitra Praja Utama (MPU), dengan puncak Rakor tingkat Gubernur di Provinsi Bali pada bulan Oktober 2016.
  7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sektor koperasi dan UMKM, sektor Perdagangan dan sektor Industri dengan biaya Rp. 50.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan target 15 kali. Terealisasi Rp. 49.732.000,- dan telah terlaksana 100%.

- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan 6 kegiatan yaitu :
1. Penyusunan laporan Keuangan, dengan biaya Rp. 30.957.000,- indikator kinerjanya adalah jumlah laporan keuangan dengan target 2 laporan. Terealisasi Rp. 30.957.000,- dan telah terlaksana 100%.
  2. Penyusunan Laporan Bulanan, dengan biaya Rp. 10.715.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah penyusunan laporan bulanan dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 10.602.800,- dan telah terlaksana 100%.
  3. Penyusunan data kepegawaian, dengan biaya Rp. 60.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah jenis data kepegawaian yang disusun dengan target 4 jenis. Terealisasi Rp. 59.160.500,- dan telah terlaksana 100%.
  4. Peningkatan akuntabilitas laporan keuangan, dengan biaya Rp. 76.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pembiayaan jasa sistem informasi data sektor koperasi dan umkm dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 66.000.000,- dan telah terlaksana 100%.
  5. Penyusunan program dan laporan capaian kinerja, dengan biaya Rp. 64.285.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah dokumen laporan yang di buat dengan target 7 dokumen. Terealisasi Rp. 59.708.000,- dan telah terlaksana 100%.
  6. Penyusunan data dan informasi, dengan biaya Rp. 70.017.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pembiayaan jasa sistem informasi data dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 69.964.000,- dan telah terlaksana 100%.
- 6) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan UMKM dengan 7 kegiatan yaitu :
1. Rakor pemberdayaan KUMKM di bidang pembiayaan, dengan biaya Rp. 100.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah rakor dengan dinas/steakholder terkait dengan target 4 kali. Terealisasi Rp. 95.198.000,- dan telah terlaksana 100%.
  2. Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi Koperasi dan UMKM, dengan biaya Rp. 105.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah

- rapat peningkatan akses permodalan bagi kumkm dengan target 1 kali. Terealisasi Rp. 104.976.000,- dan telah terlaksana 100%.
3. Rakor fasilitasi dan sosialisasi perusahaan penjamin kredit daerah, dengan biaya Rp. 29.200.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah rakor dengan dinas/steakholder terkait dengan target 4 kali. Terealisasi Rp. 29.108.000,- dan telah terlaksana 100%.
  4. Rakor pemberdayaan kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM, dengan biaya Rp. 120.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah rakor pemberdayaan kelembagaan koperasi dan umkm dengan target 2 kali. Terealisasi Rp. 116.286.700,- dan telah terlaksana 100%.
  5. Temu konsultasi pemberdayaan usaha KUMKM, dengan biaya Rp. 90.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah rapat temu konsultasi pemberdayaan usaha kumkm dengan target 2 kali. Terealisasi Rp. 73.480.000,- dan telah terlaksana 100%.
  6. Monitoring dan evaluasi koperasi penerima bantuan di 15 kab/kota, dengan biaya Rp. 80.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi dengan target 1 kegiatan. Terealisasi Rp. 79.950.000,- dan telah terlaksana 100%.
  7. Transplantasi dalam rangka pembentukan PPKD Provinsi Lampung, dengan biaya Rp. 80.800.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah transplantasi pembentukan PPKD Provinsi Lampung dengan target 1 kali. Terealisasi Rp. 80.756.000,- dan telah terlaksana 100%. Kegiatan berupa studi kajian tentang Perusahaan Penjamin Kredit Daerah ke Provinsi Jawa Timur.
- 7) Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Modal KUMKM dengan 5 kegiatan yaitu :
1. Peningkatan pelayanan PPK-BLUD, dengan biaya Rp. 600.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah waktu peningkatan kinerja layanan PPK-BLUD dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 449.800.000,- dan telah terlaksana 100%. Sedangkan sisa anggarannya merupakan sumber PAD Provinsi Lampung.

2. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUD, dengan biaya Rp. 166.205.713,-. Indikator kerjanya adalah jumlah kumkm yang termonitoring dan terevaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUD dengan target 160 orang kumkm. Terealisasi Rp. 165.981.000,- dan telah terlaksana 100%.
  3. Diklat perkuatan modal usaha bagi UMKM calon/penerima dana bergulir BLUD, dengan biaya Rp. 130.000.000,-. Indikator kerjanya adalah jumlah peserta diklat dengan target 90 orang kumkm. Terealisasi Rp. 129.340.000,- dan telah terlaksana 100%. Diklat ini dilaksanakan di Kabupaten Lampung Utara dan Kab. Lampung Tengah.
  4. Bimtek penyusunan laporan keuangan bagi KUMKM penerima dana bergulir BLUD, dengan biaya Rp. 120.000.000,-. Indikator kerjanya adalah jumlah peserta bimtek dengan target 60 orang kumkm. Terealisasi Rp. 112.992.000,- dan telah terlaksana 100%. Bimtek ini dilaksanakan di Kabupaten Mesuji, Kab. Tulang Bawang dan Kab. Tulang Bawang Barat.
  5. Sosialisasi penyaluran pinjaman BLUD KUMKM, dengan biaya Rp. 70.000.000,-. Indikator kerjanya adalah jumlah peserta sosialisasi dengan target 180 orang kumkm. Terealisasi Rp. 65.050.000,- dan telah terlaksana 100%. Sosialisasi ini dilaksanakan di Kabupaten Tulang Bawang, Kab. Tulang Bawang Barat, Kab. Lampung Tengah, Kota Bandar Lampung, dan Kab. Mesuji.
- 8) Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan 18 kegiatan yaitu :
1. Kinerja penilaian koperasi berprestasi dan hari koperasi tingkat provinsi, dengan Biaya Rp. 275.000.000,-. Indikator kerjanya adalah jumlah even hari koperasi dengan target 1 even. Terealisasi Rp. 254.643.100,- dan telah terlaksana 100%. Puncak peringatan Hari Koperasi di Lampung dilaksanakan di Kota Bandar Lampung yang dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UKM RI Bapak AA Puspayoga.. Dalam peringatan Hari Koperasi ini dilakukan penyerahan penghargaan

kepada koperasi berprestasi dan bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk koperasi yang di Provinsi Lampung berupa Program Revitalisasi Pasar Tradisional, Bantuan Mesin Mocav dan bantuan Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLTMH) serta penyerahan izin usaha mikro (IUMK) yang merupakan program dari kementerian koperasi dan UKM RI yang memberikan kemudahan kepada usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan legalitas hukum usahanya dan sertifikat IUMK ini juga dapat dijadikan sebagai syarat untuk mendapat akses permodalan ke perbankan.

2. Koordinasi kelembagaan dan updating data keragaan koperasi, dengan biaya Rp. 100.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah koordinasi kelembagaan dan updating data keragaan koperasi dengan target 15 kali. Terealisasi Rp. 99.403.000,- dan telah terlaksana 100%. Kegiatan ini mengupdate data jumlah koperasi yang ada di seluruh Provinsi Lampung melalui Sistem Online Data.
3. Workshop revitalisasi koperasi, dengan biaya Rp. 80.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah peserta workshop dengan target 100 orang. Terealisasi Rp. 67.980.000,- dan telah terlaksana 100%. Kegiatan ini bertujuan agar stake holder bisa bersama-sama untuk mengaktifkan menggiatkan koperasi agar tangguh dan mandiri..
4. Peningkatan pemahaman terhadap aturan perpajakan bagi koperasi, dengan biaya Rp. 100.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah peserta bimtek dengan target 70 orang. Terealisasi Rp. 100.000.000,- dan telah terlaksana 100%.
5. Rakor pembinaan terhadap koperasi tidak aktif, dengan biaya Rp. 150.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah peserta rakor dengan target 100 orang. Terealisasi Rp. 142.745.000,- dan telah terlaksana 100%.
6. Fasilitasi pengembangan kelembagaan kewirausahaan melalui pembentukan UKM center, dengan biaya Rp. 245.000.000,-. Indikatornya adalah jumlah sdm koperasi dan umkm yang tumbuh jiwa kewirausahanya dengan target 50 orang. Terealisasi Rp. 228.012.000,-

dan telah terlaksana 100%. Gedung UKM Center Gunung sari ini merupakan gedung eks Bambu Kuning Square (BKS) dimana Pasar Wisata UKM Certer ini diresmikan oleh Gubernur Lampung Bp. M. Ridho Ficardo UKM Center ini di bentuk bertujuan untuk peningkatan kapabilitas bisnis UMKM, sehingga dapat terus berkembang dan berdaya saing secara berkelanjutan, serta dapat menjadi ajang promosi produk ekonomi kreatif yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Provinsi Lampung.

7. Pemingkatan koperasi, dengan biaya Rp. 100.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah koperasi yang dinilai dengan target 60 koperasi. Terealisasi Rp. 97.202.000,- dan telah terlaksana 100%.
8. Diklat membuat website dan internet marketing bagi KUMKM, dengan biaya Rp. 89.867.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah peserta diklat dengan target 20 orang. Terealisasi Rp. 88.260.000,- dan telah terlaksana 100%.
9. Pelatihan akuntansi komputer bagi koperasi usaha ritel, dengan biaya Rp. 80.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah peserta pelatihan dengan target 20 orang. Terealisasi Rp. 78.683.000,- dan telah terlaksana 100%.
10. Diklat keterampilan menjahit bagi koppontren, dengan biaya Rp. 80.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah peserta diklat dengan target 32 orang. Terealisasi Rp.79.995.000,- dan telah terlaksana 100%.
11. Bimtek peningkatan kelembagaan bagi koperasi tidak aktif, dengan biaya Rp. 150.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah peserta bimtek dengan target 60 orang. Terealisasi Rp. 145.727.000,- dan telah terlaksana 100%.
12. Diklat kewirausahaan bidang boga bagi ibu rumah tangga dan remaja putus sekolah, dengan biaya Rp. 80.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah peserta diklat dengan target 20 orang. Terealisasi Rp. 74.275.000,- dan telah terlaksana 100%.



13. Diklat pembuatan aneka souvenir khas Lampung, dengan biaya Rp. 49.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah peserta diklat dengan target 20 orang. Terealisasi Rp. 47.248.000,- dan telah terlaksana 100%.
14. Monitoring dan evaluasi pengembangan SDM koperasi dan UMKM, dengan biaya Rp. 80.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah rapat monitoring dan evaluasi dengan target 1 kali. Terealisasi Rp. 74.907.000,- dan telah terlaksana 100%.
15. Bimtek manajemen usaha bagi pengelola koperasi penerima bansos, dengan biaya Rp. 70.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah peserta bimtek dengan target 34 orang. Terealisasi Rp. 66.000.000,- dan telah terlaksana 100%.
16. Bimtek kewirausahaan bagi UMKM, dengan biaya Rp. 66.200.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah peserta bimtek dengan target 30 orang. Terealisasi Rp. 66.200.000,- dan telah terlaksana 100%.
17. Pengembangan, pengendalian dan pengawasan koperasi simpan pinjam, dengan biaya Rp. 130.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah kegiatan pengembangan, pengendalian dan pengawasan koperasi simpan pinjam, dengan target 2 kali. Terealisasi Rp. 129.999.500,- dan telah terlaksana 100%.
18. Pengembangan SDM bagi pembina dan koperasi simpan pinjam, dengan biaya Rp. 150.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pengembangan SDM bagi pembina dan koperasi simpan pinjam dengan target 2 kali. Terealisasi Rp. 149.811.000,- dan telah terlaksana 100%.

## **2.2 Evaluasi Capaian RENJA Tahun 2015 Terhadap RENSTRA**

Dari form hasil evaluasi yang terdapat pada lampiran, dapat diketahui bahwa pada tahun awal perencanaan RENSTRA Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung periode 2015 – 2019 pada program dan kegiatan yang sama dengan program kegiatan tahun 2015 untuk kinerja keuangannya sudah terealisasi sebesar Rp. 5.916.301.234 atau sebesar 17,74 persen dari total anggaran RENSTRA sebesar Rp. 33.357.110.000,-. Sedangkan untuk realisasi fisiknya sudah sebesar 32,79 persen. Realisasi fisik ini tergolong besar karena tahun

2015 ini adalah tahun pertama pada pelaksanaan RENSTRA periode 2015 – 2019. Hal ini dapat di pahami dikarenakan dari beberapa kegiatan pada RENSTRA periode 2015 – 2019 hanya di lakukan di tahun 2015 saja dan hal ini mengakibatkan realisasi fisik tahun 2015 tinggi.

Berikut adalah rekapitulasi kinerja 2015 terhadap RENSTRA periode 2015 – 2019. Rata-rata capaian kinerja ini dihitung dengan membandingkan realisasi kinerja fisik dan keuangan kegiatan tahun 2015 pada RENJA tahun 2015 dengan target kinerja fisik dan keuangan kegiatan di tahun 2015 pada RENSTRA dikali 100 persen.

Tabel 2.3. Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program RENSTRA

NO	PROGRAM	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)	
		FISIK	KEUANGAN
1	Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	19.91	15.33
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	20.00	24.30
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	20.00	21.90
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	65.71	31.22
5	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20.00	14.40
6	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	42.14	20.55
7	Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Modal KUMKM	20.95	12.03
8	Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	53.61	19.46
	<b>RATA-RATA JUMLAH</b>	32.79	17.74

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pencapaian tahun 2015 terhadap RENSTRA tertinggi terdapat pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mencapai 65,71 persen untuk realisasi fisik dan 31,22 persen untuk realisasi keuangan. Meskipun tahun 2015 ini adalah awal periode RENSTRA akan tetapi realisasi sudah lumayan tinggi hal ini dikarenakan beberapa kegiatan pada RENSTRA periode 2015 – 2019 hanya dilakukan di tahun 2015 saja dan hal ini mengakibatkan realisasi fisik maupun keuangan tahun 2015 menjadi tinggi.

### 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian kinerja pada sasaran strategis Dinas Koperasi dan UMKM Povinsi Lampung dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.4. Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis Tahun 2015

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET PADA TAHUN 2015	REALIASI	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Peran Koperasi Dalam Perekonomian Lampung	1. Meningkatkan jumlah skala dan kapasitas usaha koperasi	1 Persentase pertumbuhan jumlah koperasi aktif	5 %	6,14 %	120 %
		2. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang berasal dari pelaku koperasi	2 Persentase pertumbuhan tenaga kerja sektor koperasi	1,5 %	1,91 %	127 %
		3. Meningkatkan tata kelola kinerja koperasi yang profesional	3 Persentase pertumbuhan rata-rata volume usaha koperasi	0,4 %	0,54 %	135 %
2	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	1. Meningkatkan wirausaha yang baru, tangguh dan mandiri	1 Persentase pertumbuhan wirausaha baru	50 %	67,5 %	135 %
		2. Meningkatkan jumlah UKM yang dibina	2 Jumlah UMKM	60.563	61.947	102 %
		3. Meningkatkan standarisasi pengelola koperasi dan UMKM	3 Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI, dan paten	15 %	16,66 %	111 %

Melihat dari persentase capaian kinerja pada sasaran strategis Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung nampak cukup baik, hal ini terlihat dari indikator kinerja sasaran yang sudah banyak melebihi target. Namun masih ada yang belum indikator kinerjanya yang belum tercapai.

Jumlah Koperasi per 31 Desember 2015 sebanyak 5.095 unit Koperasi. Secara kelembagaan mengalami peningkatan sebanyak 262 unit Koperasi dari jumlah koperasi per desember 2014 sebanyak 4.833 unit. Akan tetapi pada tahun 2015 jumlah koperasi aktif mengalami penurunan sebesar 281 unit di banding tahun 2014. Hal ini dikarenakan tahun 2015 sudah menggunakan *Online Data System* (ODS) atau sistem pendataan yang sudah online. Dengan telah digunakannya ODS ini maka koperasi yang aktif memperoleh sertifikasi Nomor Induk Koperasi (NIK) , dan secara otomatis jika tidak ada NIK maka Koperasi itu menjadi tidak aktif.

Dari total koperasi yang ada sejumlah 5.095 unit Koperasi, terdiri dari 2.760 (34,18%) Koperasi yang aktif dan 2.335 (45,82%) Koperasi yang tidak aktif. Adapun jumlah anggota koperasi sampai dengan saat ini sebesar Rp. 902.706 orang anggota.

Dengan adanya Program Nomor Induk koperasi tahun 2015, Kementerian Koperasi dan UMKM lebih menekankan pada kualitas koperasi dibandingkan kuantitas. Merujuk hal ini maka realisasi dari sasaran strategis yang pertama yaitu dengan target jumlah koperasi aktif sebanyak 2.954 unit Koperasi hanya terealisasi sebesar 2.760 unit Koperasi atau 93,7 persen. Hal ini pun berdampak dimana penyerapan tenaga kerja persentase capaian hanya 91,0 persen.

Dengan adanya jumlah koperasi real yang sedikit itu, merupakan koperasi yang berkualitas yang dimungkinkan tumbuh lebih mudah sekaligus mudah diawasi dan dibina, dengan anggota dan volume usahanya yang ditingkatkan. Pertimbangannya adalah untuk menciptakan system koperasi yang sehat demi tercapainya koperasi yang tangguh dan mandiri. Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan jumlah tenaga kerja, anggota koperasi, jumlah omset dan aset koperasi serta pelayanan izin simpan pinjam tahun 2014 – 2015.

Tabel 2.5. Perkembangan jumlah tenaga kerja, anggota koperasi, jumlah omset dan aset koperasi serta pelayanan izin simpan pinjam tahun 2014 – 2015.

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TAHUN 2014</b>	<b>TAHUN 2015</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Jumlah Tenaga Kerja	3.041 orang	6.737 orang
2	Jumlah Anggota Koperasi	6.951 orang	902.706 orang
3	Omset Koperasi	Rp. 3.860 T	Rp. 4,086 T
4	Aset Koperasi	Rp. 3.009 T	Rp. 15,458 T
5	Pembentukan Badan Usaha Baru	13 Koperasi	19 Koperasi
6	Perubahan Anggaran Dasar	11 Koperasi	18 Koperasi
7	Pelayanan Izin Simpan Pinjam	Belum ada	25 Koperasi

Dari tabel diatas menunjukkan capaian kinerja yang sudah lebih baik dibanding tahun 2014. Namun untuk meencapai target sasaran utama strategis pada RENSTRA Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung 2015-201, masih dibutuhkan anggaran yang memadai terutama untuk merevitalisasi koperasi-koperasi yang tidak aktif agar menjadi koperasi yang aktif serta dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak.

Program strategis lainnya yang ada di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung baik dari Kementerian Koperasi dan UKM RI maupun yang didanai oleh APBD Provinsi Lampung antara lain:

a. Pembiayaan Koperasi dan UMKM, melalui upaya:

- 1) Hibah Permodalan; melalui Kegiatan Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU) di Kab. Pesawaran, Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Bandar Lampaung

- 2) Dana bergulir BLUD; telah disalurkan ke 146 KUMKM sebesar Rp. 3,85M
- 3) Kredit Usaha Rakyat; kredit yang sudah tersalurkan sebesar Rp. 855,5 T dengan jumlah debitur sebanyak 300.780 debitur.
- 4) Dana Bergulir LPDB; telah disalurkan melalui koperasi di Kab. Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Kota Bandar Lampung.
- 5) Pembentukan Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD); sudah pada tahap studi kajian akademis ke Provinsi Jawa Timur.

b. Pemberdayaan Koperasi, melalui upaya:

- 1) Pengembangan Koperasi Pedagang Kaki Lima; yaitu PKL Batu akik di PKOR Way Halim melalui Koperasi Sutrawa.
- 2) Pengembangan Koperasi Pasar Tradisional; di Kab. Tanggamus, Lampung Utara, dan Pesawaran.
- 3) Pengembangan Koperasi Produksi; berupa bantuan mesin mokaf di Kab. Lampung Utara dan Lampung Barat.
- 4) Pengembangan Koperasi Ponpes/Pendidikan; bantuan kepada 4 sekolah di Kab. Lampung Tengah, Pesawaran, Lampung Selatan dan Bandar Lampung.

c. Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM, melalui upaya:

- 1) Pendidikan dan Pelatihan; telah dilaksanakan Diklat maupun Bimtek bagi koperasi dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah baik yang dilaksanakan di Provinsi Lampung maupun yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota. Diklat dan Bimtek tersebut antara lain:
  - a) Diklat menjahit bagi Koperasi Pondok Pesantren.
  - b) Diklat kewirausahaan bidang boga bagi ibu rumah tangga dan remaja putus sekolah.
  - c) Bimtek pengembangan SDM bagi pembina dan koperasi simpan pinjam.
  - d) Diklat perkuatan modal usaha bagi KUKM calon penerima dana bergulir.

Sampai saat ini sejauhmana hasil (outcome) Diklat dan Bimtek yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung belum dievaluasi kembali.

- 2) Magang; merupakan program magang wirausaha yang bersumber dari APBN dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang dan telah dilaksanakan selama 25 hari kerja.

d. Peningkatan Daya Saing UMKM melalui upaya :

- 1) Fasilitasi hibah sarana prasarana produksi UMKM
  - a) Pada Koperasi Pasar Makmur di Kotabumi Kab. Lampung Utara.
  - b) Pembangunan Pusat Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) pada Koperasi Bina Karya di Kab. Pesisir Barat.
- 2) Pengembangan Koperasi Produksi bantuan dari pusat berupa mesin produksi mokaf di Kotabumi Kab. Lampung Utara.
- 3) Sosialisasi serta Sertifikasi hak cipta produk pada UKM ;
  - a) Elfira UKM dengan ciptaannya Motif Bunga Tulip Lampung
  - b) UNA UKM Rumah Siger Batik dengan ciptaannya Motif Sembagi Kembang Kupu.
- 4) Pameran dan promosi produk unggulan daerah baik di dalam maupun di luar Provinsi Lampung, antara lain:
  - a) Lampung Fair di PKOR Way Halim, Bandar Lampung
  - b) Pontianak expo di di Kota pontianak, Kalimantan barat
  - c) Pameran di Kupang, NTT dalam rangka Hari Koperasi Nasional.
  - d) Pameran dalam rangka Munas V APPSI bersama Dekranasda Lampung di Makasar, Sulawesi Selatan., dll.
- 5) Pembentukan UKM Center sebagai wadah pelaku usaha yang telah diresmikan oleh Gubernur Lampung di jalan Kota Raja.
- 6) Pendampingan UMKM dengan penerbitan Izin Usaha Mikro (IUMK) sebanyak 6.822 lembar di 20 Kecamatan di Kota Bandar Lampung.

## **2.4 Isu-Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Berbagai permasalahan terkait dengan pengelolaan koperasi dan UMKM antara lain: rendahnya kualitas SDM yang berkompeten sehingga berdampak pada kinerja manajemen, lemahnya penguasaan akses teknologi tepat guna maupun moderen, kualitas produk hasil UMKM masih rendah, lemahnya akses dan penguasaan pasar, belum terbangunnya jejaring dalam pemasaran produk hasil UMKM, masih lemahnya pengembangan pola kemitraan dan jejaring usaha maupun jasa, terbatasnya dukungan prasarana dan sarana usaha, lemahnya kemampuan berinovasi, dan kurangnya informasi serta daya saing yang rendah. Di samping itu iklim usaha belum kondusif bagi UMKM. Berdasarkan uraian dan permasalahan-permasalahan pembangunan di atas, maka isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dapat disarikan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kinerja pelayanan kepada masyarakat dari aparatur Koperasi dan UMKM.
2. Rendahnya daya saing produk UMKM dalam menghadapi pasar domestik dan global.
3. Masih rendah kualitas kinerja kelembagaan Koperasi dan UMKM.
4. Lemahnya akses bagi KUMKM pada sumber daya produktif (pembiayaan dan penjaminan).
5. Lemahnya daya saing sumber daya manusia pada KUMKM.
6. Kurang kondusifnya iklim usaha bagi Koperasi, dan UMKM.
7. Belum optimalnya penyerapan lapangan kerja disektor Koperasi dan UMKM.
8. Masih rendahnya inovasi dan keterampilan sdm (pelaku) dalam pengembangan UMKM.
9. Rendahnya kapasitas lembaga pelayanan permodalan dalam menunjang kinerja UMKM.
10. Masih banyaknya koperasi tidak aktif.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja untuk pelaksanaan Renja Tahun 2015 dan uraian pada halaman terdahulu maka dapat



disimpulkan bahwa terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dalam merealisasikan pelaksanaan Renja tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai SKPD yang baru terbentuk Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung hingga saat ini masih mengalami keterbatasan baik sarana maupun prasarana kerja serta sumber daya manusia aparatur.
2. Dari hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja untuk pelaksanaan Renja Tahun 2015 capaian kinerja berjalan sesuai target yaitu 100 persen dengan penyerapan anggaran pada belanja langsung sebesar 93,54 persen. Sementara untuk kesesuaian program dan kegiatan antara Renja dengan Renstra masih terdapat ketidaksesuaian yang disebabkan karena plot anggaran yang dialokasikan tidak bisa mengakomodir semua kegiatan yang direncanakan.

### III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam pembangunan bidang ekonomi secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4). Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak (*affirmative policy*) terhadap Koperasi dan UMKM, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Guna mewujudkan kesinambungan NAWA CITA, pemerintah telah merancang prioritas pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2017 mendatang. Oleh karenanya, Provinsi Lampung bersama pemerintah kabupaten/kota memiliki tanggung jawab untuk mendukung suksesnya pencapaian prioritas nasional yaitu :

1. Pembangunan pendidikan
2. Pembangunan kesehatan
3. Pembangunan perumahan dan pemukiman
4. Kedaulatan pangan
5. Kedaulatan energi dan kelistrikan
6. Kemaritiman dan kelautan
7. Pariwisata
8. Pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK)
9. Pemerataan antar kelompok pendapatan
10. Pembangunan pedesaan dan perkotaan
11. Pengembangan konektivitas wilayah

Sejalan dengan prioritas nasional dan tema pembangunan nasional yaitu “ Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah ”, maka pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan tema pembangunan tahun 2017 yaitu “ Memperkuat sinergi Pembangunan Infrastruktur, Pelayanan Publik, dan Ekonomi untuk Mengurangi Kesenjangan Antarwilayah Menuju Lampung Maju dan Sejahtera ”.

Selanjutnya untuk mendorong percepatan pembangunan, pada tahun 2017 Pemerintah Provinsi Lampung telah merancang 8 (delapan) prioritas pembangunan dimana terkait dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, masuk dalam mengemban prioritas pembangunan ke 5 (lima) yaitu “ Mengembangkan Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif serta Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan UMKM “. Berikut ini adalah prioritas pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2017.

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah;
2. Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan kebudayaan;
3. Meningkatkan keberadaan masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan;
4. Memperkuat pembangunan pertanian dan kelautan untuk mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional;
5. Mengembangkan industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif serta meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM;
6. Melanjutkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan aparatur;
7. Mendukung stabilitas KAMTIBMAS dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif;
8. Meningkatkan kelestarian sumber daya alam dan kesiagaan penanggulangan bencana.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD

Sesuai dengan RENSTRA Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Periode 2015-2019, ada 2 (dua) Sasaran Utama Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung yang akan di lakukan pada tahun 2017 yaitu:

- 1) Meningkatnya jumlah koperasi, jumlah unit usaha umkm yang maju dan berdaya saing.
- 2) Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan SDM Koperasi dan UMKM

Indikator kinerja yang ingin dicapai dalam pembangunan Koperasi dan UMKM di Provinsi Lampung tahun 2017 adalah:

- 1) Meningkatnya jumlah koperasi yang sehat, kuat dan dipercaya.
- 2) Meningkatnya peran dan kontribusi koperasi dan UMKM di Provinsi Lampung.
- 3) Berkembangnya kebijakan dan program-program pemberdayaan koperasi dan UMKM berdasarkan hasil kajian.
- 4) Meningkatnya kualitas pengelolaan dan keterampilan SDM koperasi dan UMKM.
- 5) Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana dan pemasaran produk koperasi dan UMKM.
- 6) Bertumbuhnya wirausaha baru/pemula yang inovatif.
- 7) Meningkatnya kesadaran berwirausaha sebagai budaya dan mengembangkan semangat (*passion*) kewirausahaan di kalangan masyarakat.
- 8) Mengembangkan sistem perkaderan wirausaha baru/pemula.
- 9) Meningkatnya kualitas layanan publik yang transparan, akuntabel dan kredibel.
- 10) Tersedianya peraturan perundang-undangan yang lebih berpihak pada koperasi dan UMKM.

Selengkapnya indikator kinerja dan target sasaran sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1. Indikator Kinerja dan Target Sasaran Tahun 2017

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET PADA TAHUN 2017
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Peran Koperasi Dalam Perekonomian Lampung	1. Meningkatkan jumlah skala dan kapasitas usaha koperasi	1 Persentase pertumbuhan jumlah koperasi aktif	13 %
		2. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang berasal dari pelaku koperasi	2 Persentase pertumbuhan tenaga kerja sektor koperasi	4,0 %
		3. Meningkatkan tata kelola kinerja koperasi yang profesional	3 Persentase pertumbuhan rata-rata volume usaha koperasi	0,8 %
2	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	1. Meningkatkan wirausaha yang baru, tangguh dan mandiri	1 Persentase pertumbuhan wirausaha baru	200 %
		2. Meningkatkan jumlah UKM yang dibina	2 Jumlah UMKM	96.011
		3. Meningkatkan standarisasi pengelola koperasi dan UMKM	3 Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI, dan paten	75 %

### 3.3 Program dan Kegiatan

Jumlah Usulan Program dan Kegiatan pada RENJA tahun 2017 Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung sebesar Rp. 11.149.000.000,- (sebelas milyar seratus empat puluh Sembilan juta rupiah) terdiri dari 12 (dua belas) program dan 72 (tujuh puluh dua) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administarsi Perkantoran Rp. 1.190.000.000,- terdiri dari 12 kegiatan yaitu:
  - 1) Penyediaan jasa surat menyurat Rp. 40.000.000,-
  - 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp. 225.000.000,-
  - 3) Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp. 275.000.000,-
  - 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp. 35.000.000,-
  - 5) Penyediaan alat tulis kantor Rp. 65.000.000,-
  - 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 30.000.000,-
  - 7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp. 20.000.000,-
  - 8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp. 25.000.000,-
  - 9) Penyediaan makanan dan minuman Rp. 40.000.000,-
  - 10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rp. 175.000.000,-
  - 11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Rp. 85.000.000,-
  - 12) Pameran dan promosi pembangunan Rp. 175.000.000,-
  
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 800.000.000,- terdiri dari 4 kegiatan yaitu:
  - 1) Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rp. 300.000.000,-
  - 2) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp. 240.000.000,-
  - 3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp. 185.000.000,-
  - 4) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rp. 75.000.000,-

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 120.000.000,- terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
  - 1) Pengadaaan pakaian dinas dan perlengkapannya Rp. 120.000.000,-
  
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 1.076.000.000,- terdiri dari 7 kegiatan yaitu :
  - 1) Pendidikan dan pelatihan formal Rp. 70.000.000,-
  - 2) Koordinasi dan sinkronisasi program Rp. 120.000.000,-
  - 3) Pengelolaan SDM umum, kepegawaian dan diklat pegawai Rp. 70.000.000,-
  - 4) Monitoring dan evaluasi pelaporan Rp. 121.000.000,-
  - 5) Kerjasama anggota MPU Rp. 267.000.000
  - 6) Peningkatan jasmani dan rohani aparatur Rp. 30.000.000,-
  - 7) Pameran dan promosi produk anggota-anggota MPU Rp. 398.000.000,-
  
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 447.000.000,- terdiri dari 6 kegiatan yaitu :
  - 1) Penyusunan laporan keuangan Rp. 45.000.000,-
  - 2) Penyusunan laporan bulanan Rp. 60.000.000,-
  - 3) Penyusunan data kepegawaian Rp. 75.000.000,-
  - 4) Peningkatan akuntabilitas laporan keuangan Rp. 100.000.000,-
  - 5) Penyusunan laporan capaian kinerja Rp. 97.000.000,-
  - 6) Peningkatan data dan informasi Rp. 100.000.000,-
  
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan Rp. 110.000.000,- terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
  - 1) Penyelenggaraan musrembang SKPD Rp. 110.000.000,-
  
7. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan UMKM Rp. 2.560.000.000,- terdiri dari 15 kegiatan yaitu :
  - 1) Penilaian kesehatan bagi KSP/USP dan KJKS/UJKS Rp. 100.000.000,-

- 2) Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi KUMKM Rp. 90.000.000,-
  - 3) Study komparasi tempat praktek keterampilan usaha (TPKU) bagi pengelola koperasi pondok pesantren Rp. 220.000.000,-
  - 4) Rakor Pemberdayaan kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM Rp. 120.000.000,-
  - 5) Temu konsultasi pemberdayaan usaha KUMKM Rp. 90.000.000,-
  - 6) Monitoring dan Evaluasi Koperasi Penerima Bantuan di 15 Kab/Kota Rp. 100.000.000,-
  - 7) Monitoring dan evaluasi program TPKU pada Pondok Pesantren dan SMK/SMU Rp. 110.000.000,-
  - 8) Pengawasan pelaksanaan USP bagi KASP/USP, KJKS/UJKS dan Kopdit Rp. 50.000.000,-
  - 9) Rakor dengan dinas /instansi/pemangku kepentingan tentang peluang permodalan bagi KSP/USP Rp. 200.000.000,-
  - 10) Pendampingan pameran KUKM dalam negeri dan luar negeri Rp. 800.000.000,-
  - 11) Rapat koordinasi provinsi dengan pusat Rp. 240.000.000,-
  - 12) Pendataan dan pembinaan KUMKM Rp. 80.000.000,-
  - 13) Sosialisasi KUMKM 15 kab/kota Rp. 80.000.000,-
  - 14) Temu konsultasi dinas koperasi/UMKM se Provinsi Lampung Rp. 90.000.000,-
  - 15) Transplantasi untuk 10 KUMKM dalam Provinsi dalam rangka pembinaan ke luar provinsi Rp. 190.000.000,-
8. Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Rp. 1.500.000.000,- terdiri dari 5 kegiatan yaitu :
- 1) Peningkatan pelayanan PPK BLUD Rp. 650.000.000,-
  - 2) Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUD Rp. 275.000.000,-
  - 3) Diklat perkuatan modal usaha bagi UMKM calon / Penerima dana bergulir BLUD Rp. 200.000.000,-



- 4) Bimtek penyusunan Laporan keuangan bagi KUMKM penerima dana bergulir BLUD Rp. 200.000.000,-
  - 5) Sosialisasi penyaluran pinjaman BLUD KUMKM Rp. 175.000.000,-
9. Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi dan UMKM Rp. 400.000.000,- terdiri dari 5 kegiatan yaitu :
- 1) Diklat Studi Kelayakan Usaha bagi Pengelola Koperasi dan UMKM Rp. 70.000.000,-
  - 2) Diklat Perkoperasian bagi Pembina Koperasi dan UMKM Rp. 70.000.000,-
  - 3) Diklat Kewirausahaan bagi Pengelola Koperasi wanita Rp. 70.000.000,-
  - 4) Bimtek manajemen pengembangan usaha dan kemitraan bagi koperasi dan jasa keuangan Rp. 100.000.000,-
  - 5) Diklat manajemen koperasi bagi pengelola koperasi wanita Rp. 90.000.000,-
10. Program Peningkatan Kualitas SDM koperasi dan UMKM Rp. 180.000.000,- terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
- 1) Pelatihan peningkatan dan pengembangan kapasitas wirausaha pemula Rp. 180.000.000,-
11. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi/Revitalisasi Kelembagaan Rp. 835.000.000,- terdiri dari 6 kegiatan yaitu :
- 1) Pelatihan peningkatan pemahaman perkoperasian bagi aparatur Rp. 180.000.000,-
  - 2) Sosialisasi program tempat praktek keterampilan usaha (TPKU) bagi SMK/SMU dan Pondok Pesantren Rp 180.000.000,-
  - 3) Peningkatan pemahaman terhadap aturan perkoperasian Rp. 150.000.000,-
  - 4) Rapat koordinasi penyusunan program dan evaluasi kebijakan teknis fasilitasi pembiayaan, pembinaan dan penilaian KSP/USP Rp. 125.000.000,-

- 5) Penyebarluasan peraturan / perundangan di bidang pembiayaan, pembinaan dan penilaian KSP / USP Rp. 100.000.000,-
- 6) Identifikasi KSP/USP calon penerima program pembiayaan dari LPDB dan lembaga lainnya Rp. 100.000.000,-

12. Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi dan UMKM Rp. 1.901.000.000,- yang terdiri dari 9 kegiatan yaitu :

- 1) Kinerja penilaian koperasi berprestasi dan hari koperasi tingkat provinsi Rp. 500.000.000,-
- 2) Koordinasi kelembagaan dan up-dating data keragaan koperasi Rp. 500.000.000,-
- 3) Workshop Revitalisasi Koperasi Rp. 150.000.000,-
- 4) Rakor pembinaan terhadap Koperasi tidak aktif Rp. 180.000.000,-
- 5) Pemeringkatan Koperasi Rp. 121.000.000,-
- 6) Monitoring dan evaluasi pengembangan SDM koperasi dan UMKM Rp. 70.000.000,-
- 7) Bimtek manajemen usaha bagi pengelola koperasi penerima bansos Rp. 90.000.000,-
- 8) Diklat akutansi usaha bisnis ritel Rp. 70.000.000,-
- 9) Pelatihan manajemen SDM KUMKM bagi pengelola koperasi simpan pinjam Rp. 220.000.000,-

#### **IV. PENUTUP**

Penyusunan RENJA Tahun 2017 Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung ini di susun sebagai pedoman, arah dan tujuan penyelenggaraan pembangunan di bidang Koperasi dan UMKM. Keberhasilan pelaksanaan RENJA Tahun 2017 Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung di tentukan oleh dukungan dari seluruh pegawai dan pelaku usaha Koperasi dan UMKM di Provinsi Lampung.

Dengan tersusunnya RENJA Tahun 2017 Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung maka sasaran pembangunan di bidang Koperasi dan UMKM ditandai dengan target capaian kinerja dalam tahun 2017 telah tergambar dan tercatat dengan jelas sehingga keinginan yang harus dicapai dalam masa perencanaan dapat di ukur dan dinilai keberhasilannya.

Bandar Lampung,   Maret 2016

**KEPALA DINAS,**

**Ir. PRIHATONO G.ZAIN**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630411 198802 1 002